



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 21 April 2025

Halaman: 3

Belasan Reklame Ilegal Dibongkar

Legislatif Dorong Pemkot Yogya Lebih Gencar Lakukan Penertiban

YOGYA, TRIBUN - Kalangan legislatif dan tim eksekutif mencatat maraknya fenomena reklame ilegal yang dewasa ini tumbuh subur di Kota Yogyakarta. Temuan tersebut mengungkap keberadaan 335 titik reklame ilegal yang tersebar di penjuru Kota, di mana 51 di antaranya sudah masuk tahap penertiban.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat mengatakan, saat ini terdapat 14 titik papan iklan tak berizin yang sudah dibongkar, baik secara paksa maupun mandiri oleh pemiliknya.

Menurutnya, deretan reklame ilegal tersebut dibongkar, karena dari segi lokasi memang dipasang di area terlarang dan tak mungkin mendapatkan izin. "Karena berdiri di area larangan. Pembongkaran reklame ilegal juga seharusnya bersifat *lex spectatis*, atau tanpa menunggu tahapan penertiban," tandasnya, Minggu (20/4).

Lantaran statusnya yang sudah dipastikan ilegal dan

Milik siapapun, sepanjang itu melanggar, wajib segera ditertibkan.

tak akan memperoleh izin, sudah sewajarnya reklame-reklame tersebut langsung dibongkar. Terlebih, lanjut Octo, pihaknya pun sudah mendapatkan rekomendasi penertiban dari Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, sebagai lembaga mitra penyelenggara pemerintahan.

"Kami perlu mendapatkan kajian hukum, kalau reklame yang demikian itu, bisa ditertibkan tanpa harus menunggu tahapan. Artinya, langsung bisa kami tertibkan karena izinya juga tidak bakal turun," ucapnya.

Menjamur
Kalangan legislatif mendo-

rong Pemkot Yogyakarta untuk lebih gencar melakukan penertiban reklame ilegal. Bukan tanpa alasan, reklame ilegal dewasa ini sudah semakin menjamur hingga ratusan titik, sehingga wajib mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro menyatakan, bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi penertiban reklame ilegal. Rekomendasi penertiban tersebut, dimaksudkan untuk mengamankan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Yogyakarta dari sektor pajak reklame.

"Penertiban reklame tak akan mengganggu iklim investasi. Justru, investasi semakin sehat dan PAD dari pajak reklame bisa optimal. Pada akhirnya, ini terbukti kan," tandasnya, Minggu (20/4).

Politikus PDI Perjuangan itu menyebut, selaras hasil temuannya bersama tim eksekutif, terdapat 335 titik reklame ilegal yang tersebar

di penjuru Kota Pelajar. Ratusan reklame ilegal tersebut, dipastikan berpotensi tak menyetorkan pajaknya, di mana 51 di antaranya sudah masuk tahap penertiban.

"Fokus kami lebih pada aspek penertiban sesuai peraturan perundangan, karena hampir setiap sudut di Kota Yogya ini memiliki nilai strategis. Maka, harus dilihat lagi, jangan sampai ada yang terselip," ungkapnya.

Lebih lanjut, Antoro pun merinci, deretan papan reklame tak berizin itu berdiri dengan berbagai ukuran, mulai yang kecil, sedang, hingga besar. Beberapa di antaranya, dipasang dengan modus iklan layanan masyarakat, bahkan menampilkan logo aparat penegak hukum, namun terselip promosi komersil.

"Milik siapapun, sepanjang itu melanggar, wajib segera ditertibkan. Kami tak akan pandang bulu, kami siap sedia mendampingi Satpol PP dalam penertiban, kapanpun itu," tegasnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005